

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konflik Agraria di Indonesia

Menurut Ali Achmad Chomzah konsep agrarian dapat didefinisikan menjadi pengertian:

1. Dalam keputusan lama: Perkataan agrarian berasal dari bahasa Yunani/Grik Purba “ager”, yang berarti lading atau tanah. Dari bahasa latin “agrarius” yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Dari bahasa Belanda “akker” yang berarti ladang, tanah, pertanian. Dari bahasa Inggris “land” yang berarti tanah atau ladang.
2. Dalam Undang-undang Pokok Agraria: Pengertian agrarian dalam arti sempit dalam pasal 4 ayat 1 UUPA antara lain ditentukan, bahwa adanya ,acam-macam hak atas permukaan bumi disebut tanah tersebut. Jadi pengertian agrarian dalam arti sempit adalah permukaan bumi yang disebut sebagai tanah (Achmad, 2002: 34).

Menurut Iwan Nurhadi (2011) sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Perkara pertanahan yang selanjutnya disingkat PERKARA adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan

oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, kalangan aktivis *NGO* agraria lebih sering menyebut istilah “konflik agraria” sebagai sebuah istilah yang digunakan dalam menunjuk dan menjelaskan fenomena konflik. Pemilihan kata agraria lebih diutamakan dipakai ketimbang pertanahan, hal ini memperlihatkan bahwa konflik yang disebut tidak semata-mata pada sektor pertanahan yang dipandang lebih sempit dibandingkan istilah agraria.

Menurut Fifik Wiryani (1998: 3) ada beberapa macam sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Seperti konflik perkebunan-perkebunan mengambil alih tanah yang sebelumnya yang dikuasai oleh rakyat. Selain itu juga disebabkan seringnya konflik sosial dan budaya. Konflik budaya yang dimaksud adalah konflik budaya dalam memperebutkan tanah atau lahan. Benturan-benturan kepentingan atas tanah semakin meningkat intensitasnya karena kebutuhan yang semakin meningkat untuk investasi, sehingga prosedur yang menghambat diupayakan untuk terus dipangkas, yang kita kenal sebagai langkah-langkah deregulatif.

Sementara itu, menurut Noer Fauzi (1999: 197-203) terdapat beberapa isu konflik agraria di Indonesia berdasarkan faktor pencetusnya, antara lain adalah:

1. Pemerintah mewajibkan petani untuk mempergunakan unsur-unsur revolusi hijau, demi tercapai-terjaganya swasembada beras. Unsur-unsur revolusi hijau adalah seperti bibit unggul, pupuk pabrik dan pestisida, irigasi, mesin-mesin traktor, huller, dan organisasi produksi-distribusi seperti pelbagai fasilitas kredit, organisasi KUD yang memonopoli

pemasaran, juga BULOG, sebagai penjaga harga beras agar tetap stabil. Isu yang berkaitan dengan hal ini antara lain: (i) pihak petani ingin mempertahankan penggunaan bibit dan pengelolaan padi secara tradisional; (ii) kesempatan kerja yang menyempit karena penggunaan traktor, mekanisme tebasan, dan lain-lain; (iii) harga pupuk dan pestisida yang naik tidak sebanding dengan kenaikan harga gabah; (iv) Kredit Usaha Tani tidak mampu terbayarkan; (v) Praktek Koperasi Unit Desa.

2. Perkebunan-perkebunan mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Investasi modal di perkebunan-perkebunan semakin meluas. Jelas perluasan perkebunan membutuhkan tanah sebagai modal utamanya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa tanah-tanah di Jawa, kecuali lahan hutan, hampir tidak ada lahan kosong terlantar. Isu yang muncul antara lain: (i) pengambilan tanah-tanah produktif rakyat petani untuk Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun); (ii) Tercerabutnya petani dari tanahnya sendiri, menjadi “buruh tanah sendiri”. (iii) langkanya penyuluhan dari pihak perkebunan inti sehingga tidak menjadi *transfer of technology*; (iv) rendahnya produktivitas lahan yang dikelola oleh plasma; (v) Monopoli pemasaran hasil-hasil komoditi oleh pihak inti; (vi) proses kredit yang tidak bisa diketahui oleh petani plasma, dan jumlah hutang yang tidak bisa terbayarkan; (vi) korupsi hak-hak petani plasma, baik oleh oknum maupun pihak perantara lainnya.
3. Terdapat sejumlah kasus di mana pemerintah melakukan pengambilalihan (penggusuran) tanah untuk apa yang ditanyakan sebagai “program pembangunan”, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Isu yang

termuka diantaranya: (i) penolakan penduduk untuk meyerahkan tanah garapannya; (ii) ganti rugi yang tidak layak, dibanding dengan harha tanah di pasar umum; (iii) pemukiman kembali penduduk (*resetlemen*) yang tidak memadai, dan alternatif usaha ekonomi.

4. Konflik akibat eksploitasi hutan. Variasi konflik ini terjadi di Jawa, Bali dan Sumatera. Isu yang terlibat dalam sengketa akibat eksploitasi hutan ini antara lain: (i) penolakan petani untuk keluar dari tanah yang diklaim; (ii) kehancuran sumber daya subsistensi masyarakat adat; (iii) penyediaan sumber ekonomi dan pemukiman alternatif yang memadai; (iv) kemunduran kualitas ekologi di tingkat lokal maupun global.

2. Hukum Agraria Pasca Kemerdekaan hingga Sekarang

Pada hari Sabtu, 24 September 1960, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menurut diktumnya yang kelima dapat disebut, dan selanjutnya memang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA diungkapkan di dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, sedang penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2043. Dengan ditetapkannya UUPA, maka sistem hukum kolonial yang menyangkut hukum agraria seluruhnya dicabut, peraturan-peraturan itu adalah *Agrarische Wet*, *Domein-verklaring*, *Algemene Domeienverklaring*, *Koninklijk Besluit* serta Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali kekuatan-kekuatan *Hypotheek* (Fauzi, 1999: 65).

Tujuan dari pembentukan UUPA pada dasarnya adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Kesatuan mengandung arti bahwa hanya ada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakiri politik hukum agraria yang bersifat dualistis dan rumit.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Upaya ini menempatkan bahwa bagi rakyat yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak akan dijamin kepastian hukum, dan bagi pemegang haknya akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti pemegang hak (Fauzi, 1999: 69-70).

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, UUPA meletakkan beberapa prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar-dasar utama yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUPA, berikut Undang-undang pendukungnya maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Nasionalitas

Prinsip ini berarti seluruh wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi

hak dari bangsa, dan karenanya tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja.

2. Prinsip Hak Menguasai dari Negara

Prinsip ini berarti bahwa azas *domein* yang menjadi dasar undang-undang kolonial dihapuskan, sehingga praktek-praktek negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi.

3. Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial

Prinsip ini berarti bahwa hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat.

4. Prinsip *Land Reform*

Prinsip ini adalah gambaran dari tujuan menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Menurut MR. Sudjarwo, Menteri Agraria dalam pidatonya pada 12 September 1960, di depan DPR-GR *land reform* bertujuan: (1) untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar pada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanian sama sekali secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial; (2) Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan; (3) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi sosial; (4) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-

besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga; (5) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.

5. Prinsip Perencanaan Agraria

Prinsip ini berhubungan dengan Hak Menguasai Negara (HMN), yang dalam rangka menciptakan sosialisme di Indonesia, seperti yang dimaksud pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Negara diharuskan membuat tata guna agraria dengan menyusun suatu perencanaan umum secara nasional khususnya mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam (Fauzi, 1999: 71-18).

Proses penyelesaian kasus pertanahan jika merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN sekarang telah merubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015 (BPN, 2016).

3. Teori-teori Gerakan Sosial

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses terbentuknya sebuah gerakan sosial, khususnya yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian fenomenologi aktor gerakan petanilokal. Teori tersebut di antaranya: (1) Teori Ketidakpuasan (*Discontent Theory*) (2) Teori Deprivasi Relatif (*Relative Deprivation Theory*) (3) Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*).

a. Teori Ketidakpuasan (*Discontent Theory*).

Teori ini menyatakan bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan. Orang yang hidupnya cenderung nyaman dan puas, biasanya kurang tertarik pada gerakan sosial. Ada beragam bentuk ketidakpuasan, mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan yang kejam sampai tingkat kejengkelan terendah dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan sosial tertentu. Pada semua masyarakat modern, selalu saja terdapat kadar ketidakpuasan yang cukup untuk mendorong terciptanya gerakan sosial. Ketidakpuasan memang merupakan kondisi yang diperlukan dalam proses kelahiran suatu gerakan sosial, tetapi kondisi ketidakpuasan saja belum cukup untuk membangkitkan gerakan sosial (Martono, 2014: 368).

b. Teori Deprivasi Relatif (*Relative Deprivation Theory*)

Menurut teori ini, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Orang yang mengharap mendapatkan sedikit kemudian mendapat lebih sedikit dari yang diharapkan, akan merasakan kadar kekecewaan yang lebih rendah daripada orang yang sudah mendapat

banyak, tapi masih menginginkan yang lebih lagi dari yang sudah didapatkan. Faktor ini juga dipicu oleh proses melemahnya kendali dan tradisi kesukuan yang biasanya disertai dengan meningkatnya kadar keinginan. Teori ini adalah sejenis varian Sosial-Psikologis dari teori Tekanan. Tekanan yang dimaksud bukan diakibatkan oleh diskrepansi struktural, tetapi berasal kondisi perasaan yang subjektif, orang merasa relative gagal menggapai harapannya. Kebutuhan yang terpenuhi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan kondisi ekonomi dan politik, yang membesarkan harapan bagi beberapa kelompok, akan mudah memunculkan gerakan sosial apabila realitas tampak tidak sesuai dengan harapan. Ketidakpuasan dan frustasi akan bermunculan dan menyebabkan Gerakan Sosial (Martono, 2014: 369).

c. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Recourse Mobilization Theory*).

Teori ini menekankan pada faktor teknis, bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial. Karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan, organisasi dan taktik merupakan faktor utamayang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial. sumber daya yang dimaksud dalam teori ini adalah pandangan dan tradisi penunjang, peraturan hukum yang mendukung organisasi, dan pejabat yang dapat membantu, manfaat yang memungkinkan untuk dipromosikan, kelompok sasaran yang dapat terpicat oleh manfaat tersebut dan sumber daya penunjang lainnya. Teori

Mobilisasi Sumber daya muncul sebagai antitesa dari pandangan yang mengatakan bahwa Gerakan Sosial Muncul akibat dari penyakit sosial. Dalam pandangan lama mengatakan bahwa Gerakan Sosial muncul akibat adanya dukungan dari pihak-pihak mengalami penindasan, teraliansi dan terisolasi dalam masyarakat, karena ini teori tersebut muncul kepermukaan untuk membantah pandangan tersebut (Martono, 2014: 369).

4. Penguasaan dan Makna Tanah bagi Petani

Menurut Imam Sudiyat (1982: 66-68) penguasaan tanah privat dan tradisional dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Distribusi Tanah antar Waris

Sebagian besar petani memperoleh tanahnya melalui warisan. Dari satu segi penguasaan tanah seperti ini bermanfaat karena sebidang tanah yang mula-mulanya tidak dapat diusahakan dengan maksimal sekarang dapat digarap dengan mudah karena terbanginya tanah tersebut akibat warisan. Bila ahli waris itu petani, maka biasanya mereka mempertahankan tanah mereka karena dapat mereka kelola, namun apabila ahli warisnya selain petani maka mereka hampir sebagian besar mengasingkan tanah mereka tersebut karena tidak mampu memproduksi.

2. Lembaga Daluarsa

Manakala seorang pemilik sebidang tanah membiarkan miliknya terbengkalai, dan orang lain mengelolanya selama 15 tahun atau lebih, padahal si pemilik tidak menggunakan haknya menuntut kembali tanah tersebut, maka ia dipandang melakukan pelepasan hak (*rechtverwerking*).

3. Kesempatan Memiliki

Kadang-kadang dengan keputusan raja, sebidang tanah dapat diberikan kepada seseorang yang taat, setia, jujur, dan berbakti kepada negara. Tanah yang diberikan merupakan tanah milik negara dan jika menjadi milik perseorangan, maka tanah tersebut harus dikelola dengan seksama. Jika si penerima itu bukan petani, maka ia boleh menjualnya atau menyewakannya. Adapun proyek Land Reform yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian menetapkan luas pemilik tanah dengan luas batas minimum 5 Jireeb ($9,680 \text{ m}^2$) dan maksimum 200 Jireeb (387.200 m^2).

4. Hak Penggarap

Barang siapa yang atas seizin pemerintah untuk menggarap tanah gersang sehingga menjadi tanah produktif, maka 3 tahun sesudah itu ia akan menjadi pemiliknya yang sah dengan membayar kepada negara dengan ansuran selama beberapa tahun.

5. Prioritas

Tanah dapat dibeli, baik dari pemerintah maupun dari perseorangan. Tetapi untuk membeli tanah negara, yang didahulukan adalah kerabat miskin dan pengembara/nomad. Jenis penguasaan ini akan berhasil guna bila si pembeli benar-benar petani, lagi pula memerlukan lahan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995: 1) pada dasarnya tanah memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi, yaitu sebagai basis kehidupan keluarga; berperan sebagai modal dan simpanan perseorangan, keluarga dan perusahaan. Sifat sediaan yang tidak elastis mengakibatkan harga atau nilai tanah naik apabila kegiatan pembangunan meningkat dan kebutuhan akan lahan meningkat. Hal

inilah yang menyebabkan sering terjadinya konflik agraria dalam pembangunan suatu daerah.

Bagi petani tanah tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga bermakna sosial dan keamanan. Secara ekonomi tanah merupakan tempat sumbermakanan, tempat mencari penghidupan, sebagai tempatmelakukan aktivitasproduktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Secara sosial tanah berarti eksistensi diri, sebagai tempat untuk menemukan dirinya secara utuh, bahkan tanah merupakan simbol status sosial di dalam masyarakat. Di dalam makna keamanan, tanah akan membawa rasa aman tertentu bagi petani jika sesuatu terjadi pada diri mereka, yang berarti tanah membawa efek psikologis bagi petani (Soetrisno, 1995: 66-67).

Tanah menempati kedudukan strategis dalam kehidupan petani, karena tanah merupakan modal utama, disanalah tempat atau pangkal dari budaya petani itu sendiri. Ketika kemudian tanah dapat dimiliki dan diwariskan oleh para petani, tanah memiliki nilai yang begitu besar. Di dalam beberapa kebudayaan, tanah bahkan dipandang sebagai sikep (istri) kedua. Di dalam kasus gerakan petani yang ada pada era 1980an, memperlihatkan bahwa petani memberikan makna yang bersifat ideologis terhadap tanah (Muhklis, 2007: 34).

Petani mempertahankan tanah bukan hanya karena nilai komoditasnya, tetapi merupakan akumulasi dari nilai-nilai ideologis yang membentuknya. Petani tanpa tanah serasa bukan menjadi petani lagi, tanah merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya (nilai sakral), tanah secara utuh merupakan gambaran eksistensi dari si petani itu sendiri. Pemaknaan petani terhadap tanah juga dapat dilihat dari pola kehidupan (*livelihood*) dari petani itu

sendiri. di dalam segala aktivitas yang dilakukan petani di pedesaan seperti bercocok tanam, perburuhan, penjualan kayu, pertambangan, penyimpanan hasil produksi pertanian dan perdagangan kesemuanya berkaitan erat dengan tanah (Soetrisno, 1995: 68).

Tanah merupakan bagian penting bagi petani. Karena tanah merupakan penopang kehidupan petani. Berkurang atau direbutnya tanah yang dimiliki petani akan membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya. Kalau tanah sulit untuk didapatkan atau tidak cukup maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berkerja semakin keras atau mengintensifikan produksi pertanian. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanah bagi petani, seperti halnya tenaga kerja (*labor*), merupakan biaya tetap (*fixed cost*) yang menjadi aset mutlak agar petani bisa memenuhi kebutuhan subsistensi keluarganya (Soetrisno, 1995: 70).

Di dalam pandangan neo-populis, ukuran luas tanah minimal yang dapat dimiliki petani amat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *labor-consumer balance* yaitu petani bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, memperhitungkan efisiensi pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan jumlah anggota keluarganya (Mukhlis, 2007: 37).

Petani tidak dapat ditempatkan pada pilihan yang dikotomis di dalam pemaknaan mereka terhadap tanah. Tanah bagi petani memiliki makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara sosial tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*,

sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transcendental (Soetrisno, 1995: 75).

Banyaknya aspek yang saling memiliki keterkaitan dengan tanah semakin menegaskan pentingnya tanah bagi manusia. Bahkan begitu tingginya penghargaan tanah bagi masyarakat Jawa hingga muncul sebuah teologi "*sedumuk bathuk, senyari bumi ditohi tekaning pati*" yang artinya persoalan tanah walau hanya sejengkal, taruhnya adalah nyawa. Persoalan yang muncul pada hakatas tanah bukan hanya sebatas kepemilikan secara material belaka. Sebab, bagi sebagian besar masyarakat, tanah merupakan bagian dari sebuah kehormatan, tanah juga mempunyai ikatan emosional dengan masyarakat. Tanah merupakan tempat di mana manusia berada dan hidup. Tanah menjadi tempat manusia untuk mengada dan menegaskan jati dirinya. Sehingga, maklum ketika banyak manusia saling bersengketa tentang tanah. Sebagai anugrah Tuhan kepada manusia, ternyata tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal, atau sumber mencari nafkah semata. Lebih dari itu, tanah juga sebagai tempat "tumpah darah", "kampung halaman" yang keduanya tidak diragukan lagi mampu membangkitkan romantisme dan bahkan radikalisme seseorang atau komunitas sosial begitu rupa sehingga tidak jarang pula menjadimedan konflik dan perjuangan manakala dirasa ada gangguan datang dari luar (Mukhlis, 2007: 49).

5. Masyarakat Petani dan Gerakan Sosial Petani di Indonesia

Menurut James C. Scott dalam bukunya "Moral Ekonomi Petani" (1981), membagi secara hierarkis status yang begitu konvensional di kalangan petani adalah, petani lahan kecil, petani penyewa dan buruh tani. Menurutnya bahwa

kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh tambahan yang disewa. Ia juga mengemukakan bahwa perilaku ekonomis yang khas dari keluarga petani berorientasi “subsistensi” merupakan akibat dari kenyataan bahwa, berbeda dari satu perusahaan kapitalis, ia sekaligus merupakan satu unit konsumsian dan satu unit produksi. Unit produksi usaha tani rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak untuk mencari keuntungan bisnis.

A.T. Mosher (1991: 39-40) membagi pertanian dalam dua golongan, yaitu pertanian primitif dan pertanian modern. Pertanian primitif diartikan sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari orang-orang tua dan tidak menerima pemberitahuan (inovasi). Mereka yang mengharapkan bantuan alam untuk mengelolah pertaniannya. Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta dapat menerima pembaruan (inovasi) dalam bidang pertanian. Petani macam inilah yang dapat berkembang dalam rangka menunjang ekonomi baik di bidang pertanian maupun di bidang-bidang lainnya.

Petani di pedesaan juga dikelompokkan menjadi: (1) petani pemilik sawah; (2) petani penggarap sawah milik orang lain; dan (3) petani penyewa tanah pertanian. Berdasarkan pembagian petani, menimbulkan adanya hubungan-hubungan diantara masyarakat petani, agar petani saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat petani desa, banyak yang melaksanakan sistem sewa tanah pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakat petani akan memperoleh pendapatan dari hasil penggarapan lahan pertanian serta kepemilikan tanah atau lahan pertanian sangat dibutuhkan oleh petani. Persewaan merupakan suatu bentuk ikatan ekonomi antara pemilik tanah dan penyewa

(pemilik uang). Hal ini mereka sama-sama menguntungkan dalam usaha pertaniannya. Jika sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, pemilik tanah akan menyerahkan tanah pertaniannya kepada penyewa (Nursiyamsih, 2015: 5).

Sistem sewa tanah pertanian ini dapat dilakukan bermacam-macam cara yang harus dilakukan oleh para petani desa. Pada masyarakat desa di Jawa terdapat tiga cara bagi hasil yang umum dilakukan yaitu *maro* yang mengharuskan si penggarap membeli sendiri bibit, pupuk dan membayar buruh tani, serta menyerahkan separuh dari hasil panen kepada si pemilik tanah. Pajak atas tanah dibayar oleh pemiliknya. *Mertelu* adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap tanah hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya. Dalam sistem *merpat* penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil, tetapi ia hanya membayar buruh tani saja (Koentjaraningrat, 1994: 170-171).

Adapun ciri-ciri yang mendasari kebudayaan dan masyarakat desa petani (pertanian) di Indonesia adalah bahwa pertama-tama sebagai masyarakat agraris, Indonesia merupakan entitas (masyarakat) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sebagian juga dalam kebutuhan sandang. Berikutnya, entitas sosial itu menetap dalam wilayah/lokalitas tertentu, dan ciri lainnya adalah ia memiliki struktur otoritas kekuasaan tersendiri, memiliki sistem nilai, dan mempunyai kesadaran kolektif sebagai suatu grup inklusif, yaitu bagian dari suatu masyarakat yang lebih besar (etnis, dan bangsa tertentu). Arti lebih konkret adalah, masyarakat desa kita (pernah) relatif mandiri secara ekonomi (mampu berswasembada pangan), otonom

secara politik (memiliki ruang untuk mengatur sendiri rumah tangganya dengan memilih secara demokratis kepala desanya), dan berciri „guyub“/*gemeinschaft* atau karena memiliki lembaga-lembaga permufakatan (Soetarto *et.al*, 2008: 1.8).

Petani dan keluarganya membentuk unit terkecil produksi pertanian yaitu rumah tangga pertanian. Rumahtangga petani memiliki aset ekonomi berupa waktu, energi (tenaga kerja) dan lahan. Rumahtangga petani sekaligus merupakan unit produksi dan unit konsumsi. Oleh karena itu seluruh keputusan produksi dan konsumsi merupakan keputusan kolektif. Petani dan keluarganya tinggal dalam komunitas hidup bermasyarakat. Nilai religiusitas, norma sosial dan tradisi masyarakat yang beragam berpengaruh kuat pada seluruh aspek kehidupan petani dan keluarganya, termasuk pada aktivitas konsumsi dan produksi (Tatiek, 2016).

Gerakan petani merupakan salah satu jenis dari gerakan sosial, artinya gerakan petani itu adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh petani. Gerakan sosial termasuk yang di dalamnya gerakan petani merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, kontinyu, dan atau sistematis dengan tujuan untuk mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu, di mana mereka memiliki kepentingan yang ada di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih tinggi (Wahyudi, 2005: 7).

Gerakan petani menurut Kamanto Sunarto merupakan gerakan yang bersifat reformatif, karena menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya. Menurut Song Ho Keun, gerakan petani bisa digolongkan ke dalam gerakan sosial lama, tetapi juga dapat digolongkan sebagai gerakan sosial baru. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Charles Tilly, yang mana kategorinya gerakan petani dapat masuk dalam gerakan fase kedua, yakni

fase di mana gerakan sosial sering disebut sebagai proses politik, tindakan rasional, model mobilisasi sumber daya tentang tindakan kolektif, serta gerakan sosial itu sendiri (Wahyudi, 2005: 7).

Lindberg dan Haber mengatakan bahwa gerakan petani berakar pada persoalan produksi komoditi dan konflik dengan negara. Dalam sumber lain, Martin dan Halpin menyebutkan bahwa gerakan sosial dalam studinya tentang *landcare* memang memiliki relevansi dengan iklim politik yang sedang berkembang (Wahyudi, 2005: 8). Hotman M. Siahaan menyebutkan bahwa protes petani dapat dilihat dari tiga faktor, yakni akibat meluasnya komersialisasi lahan pertanian, berkembangnya sistem nilai baru dan ambiguitas perani, negara dalam membuat pilihan harus reformis atau menindas petani. sementara itu, Agus Sudibyo mengatakan bahwa perlawanan petani selalu didasarkan pada persoalan bahwa negara, aparat keamanan dan pemilik modal telah mengambil alih secara paksa surplus ekonomi petani, dan pendirian perkebunan-perkebunan, serta dalam menghadapi gerakan protes petani (Wahyudi, 2005: 12).

Sejarah gerakan petani Indonesia bukanlah sejarah singkat. Pada masa kerajaan hingga masuknya kolonialisme Inggris dan Belanda yang menerbitkan *Agrarian Wet* 1870, gerakan petani harus melawan kelompok feodalisme yang menjalankan penguasaan tanah melalui regulasi yang sepihak yang dikenal dengan istilah domein *veklaring*.¹ Pada zaman Orde Lama Soekarno, gerakan petani mulai berkembang dan dijadikan sebagai basis politik. Gerakan politik

¹ Pada asas *Domein Veklaring* dinyatakan “bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individu ataupun komunal, maka tanah itu menjadi milik negara”. Dengan demikian tanah itu mutlak bisa disewakan kepada perusahaan swasta oleh negara melalui Hak *Erfpacht* yakni hak untuk menguasai dan menyewakan oleh kolonial selama 75 tahun dan serta melalui Hak *Eigendom* sebagai hak keleluasan kolonial untuk menguasai tanah jika petani tidak dapat membuktikan atau menunjukkan.

agraria mulai menemui titik terang dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria 1960 sekaligus menggugurkan Undang-undang Agraria Kolonial yang secara nyata merampas hak milik rakyat petani. Akan tetapi, konflik tidak berarti hilang begitu saja. Dampak dari UUPA 1960 ini adalah munculnya konflik dalam kelas petani itu sendiri yakni kelas pemilik tanah dan petani penggarap dalam perebutan hak atas tanah. Pada masa itu, dua organisasi gerakan pedesaan beraliran kiri dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Serikat Buruh Kehutanan Indonesia (SABUKSI), melancarkan kampanye land reform atau pencatatan dan distribusi tanah kepada petani hingga aksi sepihak sebagai bentuk perjuangannya yang melahirkan konflik horizontal dalam masyarakat pedesaan Indonesia (Nashih *et. al*, 2010: 34).

Pada zaman Orde Baru di bawah Soeharto, gerakan petani mengalami banyak tekanan atas sikap politik mereka pada zaman Orde Lama yang oleh politik stigmatisasi Orde Baru selalu dikaitkan dengan gerakan komunis dan subversif. Pada zaman Orde Baru kehidupan kaum tani menjadi semakin terpinggirkan dengan program pembangunan bercorak kapitalistik yang mensyaratkan adanya perebutan lahan oleh pemerintah dari petani itu sendiri. Gerakan petani yang ada lebih memilih untuk menghindari kebijakan dan persinggungan dengan pemerintah yang militeristik sampai tiba momentum reformasi yang diklaim sebagai penumbangan rezim Orde baru secara perlahan membuka saluran politik sekaligus menjadi faktor pemicu meledaknya masalah agraria yang selama ini ditutupi oleh Orde Baru. Fenomena ini mendorong lahirnya pelawanan petani dengan cara terbuka di berbagai daerah (Nashih *et.al*, 2010: 34).

Pasca reformasi, gerakan petani mulai mencari bentuk serta berusaha menyatukan isubersama. Era demokratisasi mendudukan gerakan petani sebagai bagian dari proses transformasi sosial untuk memperjuangkan nasib petani. Gerakan petani secara khusus muncul dan berkembang berakar pada konflik-konflik agraria kemudian memunculkan karakter gerakan petani yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan karakter gerakan perlawanan petani bermula sejak pertengahan tahun 1980-an yang berlanjut hingga saat ini. Dalam periode ini gerakan perlawanan petani tidak hanya bercorak ekonomi dalam hal ini produksi pertanian, tetapi juga bercorak budaya yang kental terutama di daerah-daerah yang sistem masyarakat adatnya masih hidup, dan isu-isu yang dikembangkan bermuatan politik emansipasi yakni perubahan politik yang lebih menyentuh akar persoalan petani pada umumnya yang oleh gerakan petani diklaim sebagai reforma agraria sejati (Nashih *et.al*, 2010: 35).

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membantu dalam melakukan penelitian fenomenologi aktor gerakan petani lokal ini. Antara lain terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Hasil	Relevansi
1.	Wahyudi (2005) "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Perjuangan Atas	Hasil penelitian ini diketahui bahwa formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh aspek-aspek: 1) kondusifitas struktural, 2) ketegangan struktural, 3)	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya. Kecenderungan penelitian terdahulu terfokus pada formasi dan

	Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan”	tumbuh dan berkembangnya kepercayaan umum (generalized belief), 5) aktivasi dan mobilisasi partisipasi, 6) kontrol sosial, 7) dukungan jaringan dukungan (organisasi dalam, free rider, dan organisasi luar), 8) arena pengambilan kesempatan untuk merealisasi interes aktor, dan 9) diferensiasi struktur sosial.	struktur gerakan petani, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih kepada gerakan petani secara komprehensif, yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu fenomenologi.
2.	Basrowi (2008) “Perlawanan Masyarakat Terhadap Kekuasaan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dalam Era Transisi: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi”	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, perlawanan masyarakat yang terjadi pada era reformasi berhubungan erat dengan persoalan sosial-politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada saat itu, masyarakat desa memahami penuh dengan penekanan, pengekangan, dan pemaksaan. Pada saat yang sama, kepala desa dipahami masyarakat sering melakukan korupsi, suka berjudi, minum-minuman keras, dan suka berbuat asusila. Kedua hal tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor yang melatarbelakangi (<i>underlying factors</i>), sedangkan era reformasi merupakan faktor yang	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada topik, metode penelitian, pendekatan dan teori yang digunakan. Akan tetapi fenomenologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan fenomenologi dari Peter L. Berger. Sementara penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori fenomenologi Alfred Scutz. Sehingga hasil yang akan di dapatkan meskipun topiknya sama yaitu tentang perlawanan jelas akan berbeda.

		<p>memicu terjadinya perlawanan (<i>precipitating factors</i>). Tujuan perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan kepala desa sedikitnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan yang dimiliki “tokoh reformis” dan tujuan masyarakat secara umum. Tujuan yang dimiliki para “tokoh reformis” adalah balas dendam dengan cara menumbangkan kepala desa dan menggantinya dengan orang yang berasal dari kelompok atau pendukungnya. Tujuan perlawanan masyarakat secara umum adalah menurunkan kepala desa dan menggantinya dengan sosok kepala desa yang “baik”. Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat yang terjadi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: perlawanan secara brutal, perlawanan secara kelembagaan, dan perlawanan secara brutal dilanjutkan dengan kelembagaan. Bentuk perlawanan itu tidak terlepas dari isu-isu yang digotong tokoh reformis.</p>	
3.	<p>Srilatha Batliwala (2002) “Grassroots Movements as Transnational</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan adanya implikasi-implikasi dari adanya gerakan aktor masyarakat sipil</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada permasalahan yang</p>

	Actors: Implications for Global Civil Society”	transnasional, di antaranya: (1) aktor gerakan diciptakan oleh basis massa pemangku kepentingan langsung, dan menikmati legitimasi hak perwakilan. (2) aktor mengambil sikap untuk diberdayakan. (3) aktor telah memanfaatkan penelitian dan data untuk memberdayakan anggotanya dan menantang kebijakan publik. (4) aktor telah menciptakan bentuk- bentuk baru dari kemitraan antara pelaku dengan LSM, lembaga swasta dan publik lainnya, sarjana dan peneliti, dan negara serta lembaga multilateral. (5) Kemitraan aktor ini dengan keahlian berkaliber tinggi, dikombinasikan dengan kemampuan aktor yang kuat, telah meningkatkan akses mereka dan berdampak pada kebijakan publik, terutama di tingkat internasional.	dibahas, yaitu masalah sengketa tanah. Namun penelitian ini lebih menekankan bagaimana studi konflik antara pihak yang bersengketa terjadi. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan kepada satu pihak yang berkonflik, yaitu petani beserta arah gerakannya yang tidak lagi menggunakan teori- teroi gerakan sosial ataupun konflik, tetapi menggunakan pendekatan fenomenologi yang akan menguak kehidupan aktor gerakan.
4.	Titiek Kartika (2014) “Perempuan Lokal Vs Tambang Pasir Besi Global”	Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa identitas lokal yang terbentuk melalui gerakan diwarnai oleh relasi yang timpang, yaitu korporasi menisbikan eksistensi masyarakat lokal, tindakan perusahaan	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada studi mengenai gerakan sosial. Sementara dalam metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang sangat

		<p>mengesampingkan nilai-nilai adat “Campelo” merupakan contoh sikap korporasi global itu terhadap institusi lokal/keberadaan warga desa. Padahal, dalam hidup sehari-hari masyarakat masih menghormati adat tersebut, termasuk dalam menangani konflik serta memelihara kelestarian lingkungan. Gerakan perempuan dalam penelitian ini merupakan bentuk emansipasi rakyat dari penguasaan korporasi dengan penekanan pada pembebasan atas operasi modal dan kekuasaan. Untuk menantang hal itu, perempuan lokal terpaksa menunjukkan perilaku ekstrem dalam aksi-aksinya. Strategi ini merupakan kultur gerakan yang khas dimiliki oleh gerakan perempuan subaltern, terutama dalam mengonstruksi neksus dengan negara dan korporasi.</p>	<p>mendukung agar bagaimana hasil penelitian ini bisa komprehensif. Berada dalam satu paradigma penelitian, penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan prespektif baru, yaitu menggunakan fenomenologi, yang tidak hanya menceritakan bagaimana gerakan terjadi melalui pengamatan – yang itu digunakan dalam metode etnografi – tetapi juga ingin mengetahui sisi subjektif aktor gerakan, mulai dari latar belakang kehidupan aktor, pengalaman hidup aktor, dan bagaimana aktor mengonstruksi makna-makna baik makna perjuangan maupun makna hidup sebagai petani.</p>
5.	<p>Muhammad Afandi (2013) “Protes dan Pemberontakan “Transformasi Perlawanan Petani menghadapi Korporasi</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah peristiwa perampasan tanah di tahun 1972, petani mengalami mobilitas profesi secara horizontal dari petani menjadi buruh lintas profesi ataupun pekerja</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada studi tentang gerakan petani, beserta lawan dari gerakan petani itu sendiri. Namun lebih jauh penelitian ini</p>

	Perkebunan” (Studi Kasus Gerakan Petani Persil IV, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)”	sektor informal. Di sisi lain, juga mengalami penurunan mobilitas secara vertikal, dari petani pemilik lahan sedang menjadi petani pemilik lahan kecil. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan jumlah luas lahan untuk proses produksi juga berdampak pada bertambahnya jumlah angka pengangguran sekaligus terciptanya buruh-buruh tidak terampil di wilayah Persil IV. Penelitian ini juga mengungkapkan hal penting bahwa di era transisi demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rejim Orde Baru dan hadirnya reformasi dimaknai oleh petani sebagai suatu kesempatan politik untuk kembali melakukan perlawanan secara terbuka dengan cara menduduki kembali lahan mereka (reclaiming) sekaligus membabat seluruh tanaman perkebunan (ekstra legal).	menggambarkan tentang transformasi (perubahan) dari gerakan, serta lebih menggunakan pendekatan antropologi atau kebudayaan dengan metode etnografi. Pendekatan ini sebenarnya sangat relevan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Akan tetapi, nampaknya karena keterbatasan kemampuan dan waktu, penelitian yang akan peneliti lakukan belum menggunakan metode etnografi.
6.	James C. Scott (2000) “Senjatanya Orang-orang yang Kalah, Bentuk-bentuk Perlawanan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum lemah di pedesaan Dunia ketiga (khususnya di Malaysia) tidak pernah berhenti menentang penguasa. Pertarungan	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada topik yang dibahas, yaitu tentang bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani.

	Sehari-hari Kaum Tani”	antara kelas kaya dan miskin di Sedaka Malaysia bukan sekedar pertarungan mengenai soal pekerjaan, hak milik, padi, dan uang. Ia juga merupakan pertarungan mengenai pemaknaan simbol-simbol tentang bagaimana masa lampau dan masa sekarang dipahami dan diberi nama, pertarungan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dan menilai kesalahan, yang kesemuanya merupakan upaya untuk memberi makna partisipan kepada sejarah setempat. Detail-detail atau senjata-senjata petani kecil yang relatif tak berdaya dan selalu kalah dalam melawan penguasa terkesan tidak indah karena menggunakan unsur fitnah, pergunjingan, dan gosip yang bertujuan merusak nama baik orang, julukan-julukan kasar, gerakan tubuh atau sikap berdiam diri tapi maksudnya merendahkan orang lain.	Tetapi, dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya membicarakan bentuk perlawanan, akan tetapi juga menggali informasi-informasi terkait aktor gerakan petani dengan pendekatan fenomenologi, seperti kehidupan inter-subjektif, <i>stock of knowledge</i> , makna dan motif. Sementara penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan fenomenologi melainkan menggunakan pendekatan etnografi.
7.	Granovsky, Simon dan Larsen(2013) “Between the Bullet and the Bank: Agrarian Conflict and Access to Land	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah restrukturisasi neoliberal dan proyek yang dipimpin oleh Market-Led Agrarian Reform (MLAR), masyarakat pedesaan	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tema yang di bahas, yaitu konflik agraria. Selain itu juga membahas tentang keberhasilan gerakan akar rumput

	in Neoliberal Guatemala”	Guatemala dan organisasi tani telah berjuang untuk mengakses dan merebut kembali tanah mereka melalui tindakan langsung. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika perjuangan agraria yang terjadi di Guatemala. Sejarah klaim lahan, perselisihan tenaga kerja pedesaan, dan pendudukan tanah telah disampaikan melalui sistem MLAR. Kesulitan melarikan diri dari model neoliberal juga dibahas, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan akar rumput (<i>civil society</i>) yang paling sukses telah dimasukkan ke dalam pelaksanaan restrukturisasi neoliberalisme.	telah mampu menjadikan perubahan di tingkat kebijakan. Namun penelitian ini hanya menganalisa dalam segi konflik dan gerakan secara deskriptif, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada fenomenologi gerakan petaninya.
8.	Héctor Calleros dan Rodríguez (2013) “Land, Conflict, and Political Process: The Case of the Lacandon Community, Chiapas, Mexico (1972–2012)”	Hasil dari ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat telah terjadi dalam proses politik. Hubungannya dengan negara dan konflik terjadi selama 40 tahun, di mana LC (organisasi masyarakat sipil) telah membela hak atas tanah melalui saluran kelembagaan serta dengan cara tindakan kontroversial. Penelitian ini menunjukkan bagaimana konflik telah ditangani dengan proses politik dan berkontribusi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada kesamaannya pada masalah konflik agraria. Penelitian ini lebih menceritakan bagaimana LC (organisasi masyarakat sipil) membela hak atas tanah rakyat menggunakan cara-cara yang politis. Sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis gerakan perjuangan petaninya. Penelitian ini juga

		<p>terhadap pemahaman teoritis kategori mikro-korporatisme dan proses politik, seperti yang digunakan dalam kasus-kasus di mana masyarakat adat masuk ke dalam konflik atas tanah. Data untuk penelitian ini berasal dari wawancara, arsip agraria, permintaan informasi publik, artikel, surat kabar dan dengan metode etnografi.</p>	<p>menggunakan pendekatan etnografi, sementara penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sebanranya bisa saja penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan etnografi, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan dibatasi oleh waktu penelitian maka penelitian ini untuk tahap saat ini menggunakan pendekatan fenomenologi.</p>
--	--	--	--



Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu



Beberapa penelitian tersebut sangat membantu dalam melakukan penelitian fenomenologi aktor gerakan petani lokal. Penelitian-penelitian tersebut mempunyai relevansi yang kuat, khususnya dari segi topik penelitian yaitu terkait gerakan sosial. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dijelaskan mengenai gagasan riset dari masing-masing penelitian yang berkaitan dengan fenomenologi aktor gerakan petani lokal, yaitu sebagai berikut:

1. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Wahyudi (2005) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang formasi, struktur dan jaringan pelaku gerakan sosial petani.
2. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Basrowi (2008) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang perlawanan warga desa terhadap kekuasaan kepala desanya dengan pendekatan fenomenologi Peter L. Berger.
3. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Batliwala (2002) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang implikasi hadirnya aktor masyarakat sipil transnasional yang telah berkembang dengan baik hingga mampu mempengaruhi kebijakan publik.
4. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Kartika (2014) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang perlawanan perempuan lokal terhadap investasi tambang perusahaan asing yang sangat merusak lingkungan, dengan pendekatan etnografi.
5. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Affandi (2013) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang perubahan-perubahan gerakan perlawanan petani terhadap perkebunan swasta dengan pendekatan etnografi.
6. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Scott (2000) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang bentuk dan strategi perlawanan sehari-hari petani kecil terhadap penguasa negara dengan pendekatan etnografi.
7. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Simon dan Larsen (2013) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang perjuangan tanah dan

upaya restrukturasi ideologi liberal oleh masyarakat sipil dengan sistem *Market Led Agrarian Reform (MLAR)*.

8. Gagasan penelitian yang digambarkan oleh Calleros dan Rodríguez (2013) mencoba untuk menitik beratkan kajiannya tentang perlawanan masyarakat dalam memperjuangkan tanah adat yang sudah berlangsung selama 40 tahun dan dibantu oleh organisasi masyarakat sipil, dengan pendekatan etnografi.

Studi fenomenologi gerakan petani di eks Perkebunan Gondang Tapen merupakan penelitian untuk mengisi kekosongan atau melengkapi dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Perspektif dan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz masih jarang atau bahkan belum ada yang digunakan dalam studi gerakan sosial. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan ruh baru studi gerakan sosial, yang tidak hanya mendeskripsikan kasus, tetapi juga mencoba untuk masuk ke dalam dunia intersubjektif aktor gerakan sosial. Oleh karenanya hasil yang didapat dalam penelitian ini tentunya sangat berbeda dari studi-studi gerakan sosial yang telah ada.

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Akan tetapi sebelum membahas teori fenomenologi secara komprehensif, mengetahui posisi teori fenomenologi dalam pemetaan ilmu sosiologi sangat penting.

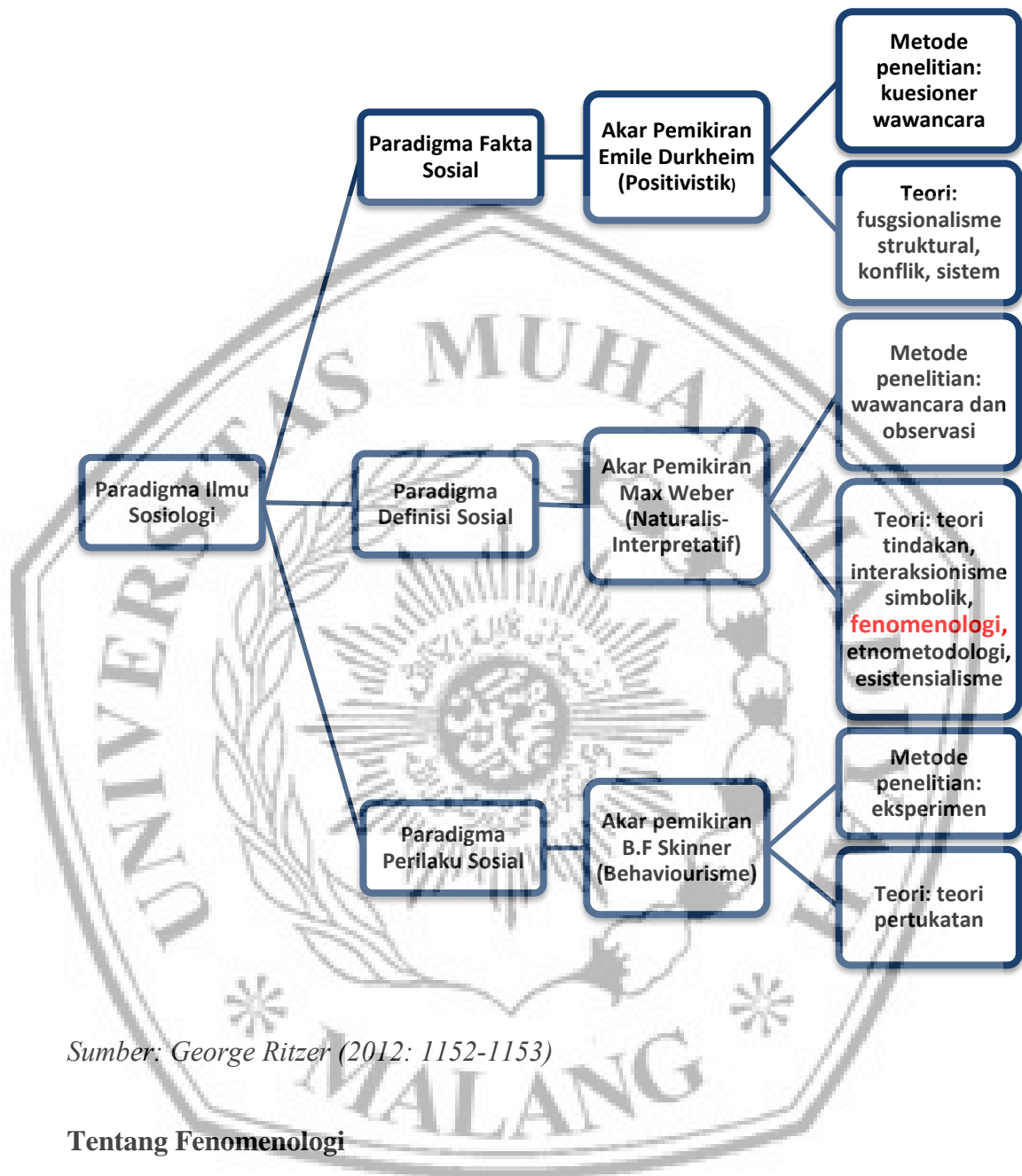
Posisi Fenomenologi dalam Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu dengan paradigma yang tidak hanya satu. Menurut George Ritzer setidaknya cara pandang ilmu ini bisa diklasifikasikan

menjadi tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Dari ketiga paradigma tersebut mempunyai tradisi teori, sejarah dan metode penelitian yang dapat dibedakan. Fenomenologi merupakan teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial. Berikut pemetaan teori dalam sosiologi, serta posisi fenomenologi dalam paradigma ilmu sosiologi.



Gambar 2.2 Posisi Fenomenologi dalam Ilmu Sosiologi



Tentang Fenomenologi

Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau

dunia kesadaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku. Sebab realitas itu sesungguhnya bersifat objektif dan maknawi. Ia bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan anggapan-anggapan seseorang. Itu terbenam sebagai suatu kompleks gramatika kesadaran di dalam diri manusia. Di situlah letak kunci jawaban terhadap apa yang tereksresi atau menggejala di tingkat perilaku (Bungin, 2010: 44).

Fenomenologi bermula dari pandangan Edmund Husserl yang meyakini bahwa sesungguhnya objek ilmu itu tidak terbatas pada hal-hal yang empiris (terindera), tetapi juga mencakup fenomena yang berada di luar itu, seperti persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek tentang “sesuatu” di luar dirinya (Idrus, 2009: 58-59). Menurut Husserl, fenomenologi menunjuk pada usaha untuk menggambarkan dasar-dasar akhir pengalaman manusia dengan “melihat melebihi” bentuk-bentuk khusus pengalaman sehari-hari agar tergambarkan esensi yang menggarisbawahi pengalaman itu. Husserl mempertahankan bahwa pengalaman individu atas dunia bergantung pada kemampuan memahami esensi fenomena yang ia rasakan (Dwi, 2008: 151).

Edmund Husserl yang dikenal sebagai *founding father* fenomenologi mengembangkan ide tentang dunia kehidupan (*lifeworld*). Ia menggunakan filsafat fenomenologi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya struktur pengalaman yang merupakan cara manusia mengorganisasi realitasnya sehingga menjadi terintegrasi dan autentik. Bagi Husserl, dunia kehidupan juga menyediakan dasar-dasar harmoni kultural dan aturan-aturan yang menentukan kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang riil dan normal. Dunia kehidupan juga menghasilkan latar belakang ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai kepercayaan-kepercayaan

yang diterima apa adanya (*taken for granted*) dalam sebuah tata kelakuan sistematis (Haryanto, 2012: 132).

Setiap pengetahuan dilegitimasi oleh *originary presentive intuition*. Konsep tersebut merupakan inti filsafatnya. Dalam hal ini, ia mengkritik tradisi empirisme yang terlalu naif menganggap bahwa setiap penilaian dilegitimasi oleh pengalaman, padahal dalam kenyataannya berbagai bentuk intuisi berada di bawah proses penilaian dan penalaran seseorang. Dalam usaha melihat hakikat, Husserl menggunakan intuisi. Suatu “benda” tidak dapat secara langsung memperlihatkan hakikatnya sendiri. Apa yang kita temui pada “benda” itu pertama-tama dalam pikiran kita bukanlah hakikat. Apa yang menjadi hakikat sebenarnya di balik benda itu. Karena pemikiran pertama (*first look*) tidak mampu membuka tabir yang menutupi hakikat benda, diperlukan pemikiran kedua (*second look*). Instrumen yang digunakan untuk menemukan pemikiran kedua tersebut sehingga dapat ditangkap hakikat dari gejala adalah intuisi (Haryanto, 2012: 132).

Martin Heidegger, seorang filsuf yang mempunyai pengaruh besar terhadap berbagai disiplin ilmu, memberikan kontribusinya terhadap perkembangan fenomenologi melalui pengembangan filsafat eksistensial fenomenologi. Dalam berfilsafat, Heidegger selalu berusaha mencapai pengertian-pengertian mendalam berdasarkan pengalaman eksistensial manusia. Sementara, tokoh yang berhasil membuat fenomenologi menjadi pendekatan yang aplikatif adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang memfokuskan pada persoalan religiusitas. Setelah itu, fenomenologi menjadi pendekatan yang menarik minat

feminis, seperti Dorothy Smith, Sandra Bartky, Judith Butler, dan lain-lain (Haryanto, 2012: 132).

Fenomenologi Alfred Schutz

Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial (Nindito, 2011: 80). Sekalipun Schutz tidak pernah menjadi murid Husserl (Ia belajar hukum di University Wina, sekembalinya dari tugas militer di Italia selama perang dunia I), ia bersama dengan teman kerjanya, Felix Kaufman, mempelajari karya Husserl secara intensif untuk mencari dasar sosiologi pemahaman (*a „sodology of understanding*) yang diturunkan dari kerja Max Weber. Pada saat itu, fenomenologi Husserl cukup menarik minat dari banyak ilmu, seperti psikologi sosial, pendidikan, ilmu kesehatan, dan banyak ilmu yang lain (Dwi, 2008: 149).

Schutz adalah seorang intelektual yang tertarik oleh pemikiran Max Weber, tetapi berusaha menjernihkan dan mengembangkannya dalam filsafat fenomenologi Husserl yang ia kenal secara pribadi. Schutz-lah yang mengembangkan fenomenologi dalam sosiologi dan sepanjang karier akademiknya dicurahkan untuk memperbaiki pemahaman sosiologis mengenai dunia kehidupan (*lifeworld*). Ia menggunakan sumber fenomenologi yang dikembangkan Edmund Husserl untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik sebagai pilar-pilar filosofis ilmu sosial. Ia juga mengkritik teori Max Weber tentang tindakan sosial dan interpretasi. Dia berusaha memahami bagaimana sebuah teori tindakan harus ilmiah. Argumentasi sentralnya adalah bahwa sosiologi harus memahami bagaimana aktor sosial menggunakan tipifikasi untuk

mengorganisasi pengetahuan umum (*common sense*) dari dunia kehidupannya dan untuk memahami perbedaan-perbedaan dasar antara pengetahuan sehari-hari dan pengetahuan ilmiah. Riset fenomenologi dengan demikian merupakan studi relevansi perbedaan-perbedaan bentuk pengetahuan bagi tindakan sosial (Haryanto, 2012: 145).

Meskipun Schutz memberikan kritik atas teori Max Weber, namun Max Weber-lah yang menjadi salah satu sosiolog yang begitu menginspirasi. Kekagumannya pada tokoh sosiologi klasik ini utamanya tertuju pada konsep *verstehen*. Fenomenologi Schutz banyak mengadaptasi pandangan *verstehen* yang telah diletakkan Max Weber. Bagi Schutz, *verstehen* sebagai pemahaman tentang makna subjektif individu sama dengan penekanan fenomenologis yang menganalisis struktur makna pada individu dan hubungan struktur tersebut dengan individu-individu lain. Bisa dikatakan bahwa pengalaman dan asumsi dari makna-makna bersama merupakan dasar yang mungkin untuk membuat kehidupan sosial (Dwi, 2008: 153). Schutz mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Jadi, sebagai peneliti ilmu sosial, kita pun harus membuat interpretasi terhadap realitas yang diamati. Orang-orang saling terikat satu sama lain ketika membuat interpretasi ini (Raho, 2007: 126).

Fenomenologi sosial yang diintrodusir oleh Schutz mengandaikan adanya tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yaitu dunia sehari-hari, tindakan sosial dan makna. Dunia sehari-hari adalah dunia yang paling fundamental dan terpenting bagi manusia. Dikatakan demikian dikarenakan dunia sehari-hari adalah lokus kesadaran intersubjektif yang

menjembatani adanya kesadaran sosial. Dalam dunia ini, seseorang selalu berbagi dengan teman, dan orang lain, yang juga menjalani dan menafsirkannya (Sujatmiko *et.al*, 2014: 3).

Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari (Ritzer *et.al*, 2007: 94). Instrumen yang dijadikan alat penyelidikan oleh Schutz adalah memeriksa kehidupan bathiniyah individu yang direfleksikan dalam perilaku sehari-harinya (Campbell, 1994: 233).

Dunia kehidupan sehari-hari ini membawa Schutz mempertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dia mencari jawaban dalam kesadaran manusia dan pikirannya. Baginya, tidak ada seorang pun yang membangun realitas dari pengalaman intersubjektif yang mereka lalui. Kemudian, Schutz bertanya lebih lanjut, apakah dunia sosial berarti untuk setiap orang sebagai aktor atau bahkan berarti baginya sebagai seorang yang mengamati tindakan orang lain? Apa arti dunia sosial untuk aktor/subjek yang diamati, dan apa yang dia maksud dengan tindakannya di dalamnya? Pendekatan semacam ini memiliki implikasi, tidak hanya untuk orang yang kita pelajari, tetapi juga untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain (Emmanuel, 2012).

Banyak gagasan Schutz yang menyinggung penjelasan tentang kehidupan sehari-hari (*common sense*). *Common sense* merupakan lambang yang

terorganisasi dari pengetahuan yang diterima begitu saja, di mana aktivitas kita disadarkan dalam sikap alamiah kita tidak mempertanyakannya. Meminjam pandangan Ritzer, bahwa *common sense* sama dengan dunia intersubjektif. Dalam konteks ini, orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka (Ritzer dalam Dwi, 2008: 156).

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif ketika manusia tersebut bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila kita ingin menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan (Campbell, 1994: 235-237).

Schutz mengemukakan bahwa ketertarikan manusia dalam sehari-hari merupakan sesuatu yang bersifat sangat praktis dan tidak bersifat teoritis. Sikap alami mereka diatur oleh motif-motif pragmatis yakni mereka berupaya mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan mereka. Schutz menyebut kehidupan sehari-hari yang praktis tersebut dengan istilah dunia kerja realitas puncak. Kehidupan keseharian merupakan wadah kehidupan sosial dimana manusia memperlakukan dunia ini sebagai lahan yang harus dikuasai, dan mereka berusaha keras untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang datang dari luar untuk mencapai pada rencana-rencana kehidupan mereka. Realitas puncak tersebut, berbagai harapan, keinginan dan kekuatan, mendesak untuk bertindak, merencanakan mengatasi, hambatan-hambatan dan mewujudkan proyek-proyek. Kecemasan kehidupan keseharian muncul dari pengalaman eksistensi yang paling mendasar yakni pengetahuan dan ketakutan akan kematian. Kecemasan merupakan suatu elemen asasi yang berasal dari pengalaman sosial di dalam dunia kerja yakni kehidupan sehari-hari (Bachtiar, 2006: 147).

Tujuan fenomenologi adalah mendorong kita untuk menyadari dan mempelajari serta mengontrol apa yang sedang kita lakukan dan membentuk kehidupan sosial. Sekalipun manusia tidak memiliki kontrol penuh atas setiap situasi dalam kehidupan sosial mereka, akhirnya mereka sanggup memilih proyek hidupnya. Hal ini disebabkan masing-masing individu memiliki *stock of knowledge*, kemudian di antara mereka terjadi *sharing*, negosiasi, dan manuver-manuver demi terbentuknya kohesi sosial (Dwi, 2008: 154).

Stock of knowledge oleh Schutz adalah keseluruhan peraturan, norma, konsep tentang tingkah laku yang tepat, dan lain-lain yang kesemuanya memberikan kerangka referensi atau orientasi kepada seseorang dalam memberikan interpretasi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sebelum melakukan suatu tindakan. Beberapa ciri dari *stock of knowledge* yang mendapat penekanan khusus dari Schutz adalah sebagai berikut.

1. Realitas yang dialami oleh orang-orang merupakan stok pengetahuan bagi orang tersebut. Bagi anggota-anggota sebuah masyarakat, stok pengetahuan mereka merupakan realitas terpenting yang membentuk dan

mengarahkan semua peristiwa sosial. Aktor-aktor menggunakan stok pengetahuan ini ketika mereka berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya.

2. Keberadaan stok pengetahuan ini memberikan ciri *take for granted* (menerima sesuatu begitu saja tanpa memepertanyakannya) kepada dunia sosial. Stok pengetahuan ini jarang menjadi objek refleksi sadar atau menjadi semacam asumsi-asumsi dan prosedur implisit yang diam-diam digunakan oleh individu-individu ketika berinteraksi.
3. Stok pengetahuan ini dipelajari dan diperoleh oleh individu melalui proses sosialisasi di dalam dunia sosial dan budaya tempat dia hidup. Akan tetapi, kemudian stok pengetahuan tersebut menjadi realitas bagi aktor di dalam dunia yang lain karena ke mana saja ia membawa stok pengetahuan itu dalam dirinya.
4. Individu-individu bertindak berdasarkan sejumlah asumsi yang memungkinkan mereka menciptakan perasaan “saling” atau timbal balik: (a) yang lain dengan si aktor yang berhubungan atau berelasi dianggap pada waktu itu juga menghayati atau memiliki stok pengetahuan yang khas dan berbeda dari stok pengetahuan si aktor karena memiliki riwayat hidup yang berbeda, tetapi stok pengetahuan ini tidak diperdulikan si aktor ketika ia berelasi dengan mereka.
5. Eksistensi dari stok pengetahuan dan perolehannya melalui sosialisasi. Asumsi yang memberikan aktor rasa saling atau timbal balik, semua beroperasi untuk memberikan kepada aktor perasaan atau asumsi bahwa dunia ini sama untuk semua orang dan ia menyingkapkan ciri-ciri yang

sama kepada semua. Apa yang membuat masyarakat bisa bertahan atau menjaga keutuhannya adalah asumsi akan dunia satu yang sama.

6. Asumsi akan dunia yang sama itu memungkinkan si aktor bisa terlibat dalam proses tipifikasi, yakni berdasarkan tipe-tipe, resep-resep, atau pola-pola tingkah laku yang sudah ada. Tindakan atau perbuatan pada hampir semua situasi kecuali yang sangat personal dan intim, dapat berlangsung melalui tipifikasi yang bersifat timbal balik ketika si aktor menggunakan stok pengetahuannya untuk mengategorikan satu sama lain dan menyesuaikan tanggapan mereka terhadap tipifikasi-tipifikasi tersebut.
7. Dengan tipifikasi tersebut, si aktor dapat secara efektif bergumul di dalam dunia mereka karena setiap nuansa dan karakteristik dari situasi mereka tidak harus diperiksa. Selain itu, tipifikasi mempermudah penyesuaian diri karena memungkinkan manusia memperlakukan satu sama lain sebagai kategori-kategori atau objek dengan tipe-tipe tertentu (Haryanto, 2012: 146-147).

Alfred Schutz mengembangkan sosiologi dunia kehidupan dan fenomenologi sosial. Menurut Schutz, dunia kehidupan merupakan sesuatu yang terbagi, merupakan dunia kebudayaan yang sama. Kepercayaan-kepercayaan dunia kehidupan berdasarkan tipifikasi-tipifikasi, asumsi-asumsi, dan pengetahuan yang diterima begitu saja (*taken for granted*) melalui interpretasi dan klasifikasi seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Individu melukiskan pengalaman dan biografinya untuk memahami orang lain. Penelitian ilmu sosial mengonfrontasikan berbagai makna dan interpretasi dunia kehidupan. Bagi Schutz, kategori-kategori pengetahuan berasal dari dunia kehidupan. Tipe ideal,

ide-ide yang paling umum dalam ilmu sosial tentang kehidupan sosial tempat ilmuwan sosial menggunakannya berdasarkan tipifikasi-tipifikasi sehari-hari. Seluruh pengetahuan dimulai dari akal sehat (*common sense*) dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hal itu muncul. Schutz berpendapat bahwa kepuasan ilmu sosial harus dimulai dengan suatu pemahaman dunia subjektif dari seseorang, jadi harus mempelajari dunia kehidupan sosialnya (Haryanto, 2012: 147-148).

Schutz mengadopsi aliran fenomenologi ke dalam sosiologi dengan menekankan bahwa interpretasi-interpretasi tidaklah unik bagi setiap orang, tetapi tergantung pada kategori-kategori kolektif atau yang ia sebut sebagai “tipifikasi”. Masing-masing kelompok mempunyai seperangkat “pengetahuan bersama”. Meskipun demikian, orang hanya dapat berkomunikasi dengan berpijak pada asumsi bahwa dirinya memiliki makna yang sama, dan kemudian menegosiasikan untuk mendapatkan saling pengertian dan persetujuan komprehensif (Haryanto, 2012: 149).

Schutz membedakan antara makna dan motif. Makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya. Sementara motif, menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Makna mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari sekedar idiosinkratik. Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif “dalam kerangka untuk” (*in order to*) dan

motif “karena” (*because*). Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Motif kedua berkaitan dengan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu (Haryanto, 2012: 149).

Motif merujuk pada seseorang melakukan sesuatu. Motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertindak laku dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Motif juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sudirman, 2007: 73). Motif (*in order to*) merupakan alasan seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diharapkan di masa yang akan datang dengan kata kunci agar/supaya. Sementara motif (*because*) merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar dengan kata kunci karena (Haryanto, 2012: 150).

Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab (*relasi-kami*) dan hubungan impersonal dan rengang (*relasi-mereka*). Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, untuk meneliti hubungan impersonal secara ilmiah. Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubjektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual. Secara keseluruhan Schutz memusatkan perhatian pada hubungan dialektika antara cara individu membangun

realitas dan realitas kultural yang mereka warisi dari para pendahulu mereka dalam dunia social (Ritzeret.al, 2007: 94-95).

Alfred Schutz mengemukakan betapa pentingnya dunia yang hidup (*life-world*), peristiwa sehari-hari yang menghasilkan pemahaman atas dunia. Setiap orang tentu memiliki makna serta selalu berusaha untuk hidup di dunia yang bermakna. Schutz membedakan dua macam makna insani: ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara aktual atau potensial “dalam jangkauan” (*within reach*), atau ada di tangan (*athand*), yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti sendiri secara alamiah dalam kehidup sehari-hari. Kedua adalah makna-makna di luar dunia kehidupan individu itu sendiri, makna masyarakat-masyarakat lain atau sektor yang kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam: yaitu makna-makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak dalam jangkauan tetapi juga disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin intelektual tertentu (Bachtiar, 2006: 146-147).

D. Kerangka Pemikiran

Bagan di bawah ini menunjukkan kerangka alur pemikiran peneliti dalam penelitian fenomenologi aktor gerakan petani lokal.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

